

Dinamika Dunia Islam Pasca Keruntuhan Kekholifahan Usmani (Fregmantasi, Neo-Kolonialisme dan Rekonstruksi Narasi Pendidikan Islam)

Lina Nurfalah¹, Dadang Sulaeman², Tiar Anwar Bachtiar³

^{1,2,3} Program Magister Pendidikan Islam, IAI Persis Garut, Indonesia

linanurfalah@iaipersisgarut.ac.id, dadangsulaeman@iaipersisgarut.ac.id, tiaranwarbachtiar@iaipersisgarut.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20-06-2026

Disetujui: 26-06-2026

Keywords:

Fragmentation
Islamic Education
Narrative
Historical
Reconstruction
Neo-Colonialism
Ottoman Caliphate

Abstract: This paper examines the dynamics of the Islamic world after the collapse of the Ottoman Caliphate in 1924, which became an important turning point in modern Islamic history. The collapse of the caliphate institution not only marked the end of the *ukhuwah*-based transnational political system, but also triggered the geopolitical fragmentation of Muslims into a nation-state, accompanied by the emergence of Western neo-colonialism through mechanisms of political control, economic exploitation, and cultural westernization. This study analysis the causes of the collapse of the Ottomans from the perspective of internal factors (bureaucratic decline, corruption, technological backwardness) and external factors (European pressure, World War I, and Western intervention), including the role of the Arab Revolution in accelerating the birth of modern countries in the Middle East. In addition, this paper criticizes the narrative of Islamic history in textbooks that tends to be descriptive, lacks critical analysis, and is full of Eurocentrism bias, thus weakening the historical awareness and identity of Muslims. Through the theoretical study of the concept of the caliphate, the theory of the collapse of civilization by Ibn Khaldun and Arnold Toynbee, and the concept of neo-colonialism, the author recommends a reconstruction of the narrative of Islamic education based on a critical-historical, integrative, and contextual approach. This approach is expected to build students' critical awareness, strengthen the identity of the *ummah*, and encourage efforts to reconstruct Islamic civilization in the midst of contemporary challenges.

Abstrak: Tulisan ini mengkaji dinamika dunia Islam pasca keruntuhan Kekhalifahan Usmani pada tahun 1924, yang menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam modern. Runtuhnya institusi khilafah tidak hanya menandai akhir dari sistem politik transnasional berbasis *ukhuwah*, melainkan juga memicu fragmentasi geopolitik umat Islam ke dalam negara-bangsa (*nation-state*), disertai munculnya neo-kolonialisme Barat melalui mekanisme pengendalian politik, eksploitasi ekonomi, dan westernisasi budaya. Penelitian ini menganalisis sebab-sebab keruntuhan Usmani baik dari perspektif faktor internal (kemunduran birokrasi, korupsi, keteringgalan teknologi) maupun eksternal (tekanan Eropa, Perang Dunia I, serta intervensi Barat), termasuk peran Revolusi Arab yang mempercepat lahirnya negara-negara modern di Timur Tengah. Selain itu, tulisan ini mengkritisi narasi sejarah Islam dalam buku pelajaran yang cenderung deskriptif, minim analisis kritis, serta sarat bias *Eurocentrism*, sehingga melemahkan kesadaran historis dan identitas umat Islam. Melalui kajian teoretis konsep khilafah, teori keruntuhan peradaban Ibnu Khaldun dan Arnold Toynbee, serta konsep neo-kolonialisme, penulis merekomendasikan rekonstruksi narasi pendidikan Islam berbasis pendekatan kritis-historis, integratif, dan kontekstual. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran kritis peserta didik, memperkuat identitas umat, serta mendorong upaya rekonstruksi peradaban Islam di tengah tantangan kontemporer.

PENDAHULUAN

Runtuhnya Kekhalifahan Utsmani pada tahun 1924 merupakan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah dunia Islam modern karena menandai berakhirnya institusi politik Islam yang selama berabad-abad menjadi simbol persatuan umat sekaligus otoritas pemerintahan transnasional. Penghapusan institusi khilafah oleh Mustafa Kemal Atatürk bukan sekadar perubahan administratif pemerintahan Turki, melainkan transformasi besar yang menggeser

orientasi politik umat Islam dari sistem berbasis kesatuan umat (*ummah*) menuju model negara-bangsa (*nation-state*) yang dipengaruhi paradigma politik modern Barat.¹ Perubahan tersebut melahirkan konsekuensi geopolitik yang luas, termasuk munculnya fragmentasi wilayah Islam, terbentuknya identitas nasional yang baru, serta meningkatnya dinamika relasi kekuasaan antarnegara Muslim.

Hal ini menimbulkan problematika, di satu sisi proses dekolonisasi membuka ruang bagi lahirnya negara-negara merdeka di kawasan Timur Tengah dan wilayah Muslim lainnya. Namun di sisi lain, terbentuknya batas-batas nasional baru justru memperkuat segmentasi politik dan identitas yang sebelumnya berada dalam satu ikatan kekhalifahan.² Akibatnya, konflik internal di dunia Islam semakin kompleks, baik yang berakar pada kepentingan politik, perbedaan ideologi, mazhab keagamaan, maupun perebutan pengaruh regional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya kekhalifahan tidak otomatis menghasilkan integrasi politik baru.

Dalam perspektif teori peradaban, keruntuhan Kekhalifahan Utsmani dapat dipahami melalui pendekatan internal dan eksternal. Ibnu Khaldun melalui teori *ashabiyah* menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu peradaban sangat ditentukan oleh kekuatan solidaritas sosial yang menopang struktur politik dan budaya masyarakat. Ketika solidaritas melemah akibat kemewahan, birokrasi yang korup, dan konflik elit, maka peradaban akan memasuki fase kemunduran.³ Dalam konteks Utsmani, melemahnya hubungan internal menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat disintegrasi negara. Di sisi lain, Arnold Toynbee menekankan bahwa keberhasilan suatu peradaban ditentukan oleh kemampuan merespons tantangan (*challenge and response*). Ketidakmampuan Utsmani menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi, militer, dan ekonomi global menyebabkan posisi politiknya semakin tertinggal dibandingkan kekuatan Barat.⁴

Pasca runtuhnya kekhalifahan, dunia Islam memasuki fase dominasi global baru yang dipahami sebagai neo-kolonialisme. Berbeda dengan kolonialisme klasik yang bersifat teritorial dan militer, neo-kolonialisme bekerja melalui mekanisme yang lebih kompleks seperti ketergantungan ekonomi, intervensi politik, dan penetrasi budaya.⁵ Konsep ini diperkenalkan oleh Kwame Nkrumah yang menjelaskan bahwa suatu negara dapat tampak merdeka secara formal, tetapi tetap bergantung secara struktural kepada kekuatan eksternal.⁶ Dalam konteks negara-negara Muslim, pengaruh tersebut terlihat dalam sistem pemerintahan, kebijakan ekonomi, hingga arah pendidikan yang banyak mengadopsi model pembangunan Barat.

¹ Samsuriadi Samsuriadi, Indo Santalia, and Wahyuddin Wahyuddin, 'Sejarah Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki Dan Ide Perbaharuan Mustafa Kemal', *JBKPI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 2.02 (2023), 21–31 <<https://doi.org/10.26618/jbkpi.v2i02.8399>>.

² John C. Campbell and Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples, Foreign Affairs* (Cambridge: Harvard University Press, 1991), LXX <<https://doi.org/10.2307/20044894>>.

³ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History* (Princeton: Princeton University Press, 1967).

⁴ Arnold J. Toynbee, *A Study of History* (London: Oxford University Press, 1957).

⁵ Anouar Abdel-Malek and Michael Pallis, *Contemporary Arab Political Thought* (Zed Books and U.S. distributor, Biblio Distribution Center, 1983) <<https://cir.nii.ac.jp/crid/1970867909890790312.bib?lang=en>> [accessed 26 June 2026].

⁶ Kwame Nkrumah, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism* (London: Thomas Nelson & Sons, 1965).

Dampak paling dalam terjadi pada kesadaran historis umat Islam. Narasi sejarah dalam buku pelajaran di banyak negara Muslim cenderung parsial, deskriptif, dan sarat bias *Eurocentrism*, sehingga melemahkan identitas dan daya kritis generasi muda dalam menghadapi tantangan global.

Kajian historiografi Islam modern menunjukkan bahwa penulisan sejarah di berbagai negara Muslim tidak jarang dibentuk oleh orientasi nasionalisme dan kebutuhan pembentukan identitas negara. Akibatnya, sejarah Islam sering disajikan secara parsial dan terfragmentasi berdasarkan batas-batas nasional, sehingga mengurangi pemahaman mengenai keterhubungan historis antarwilayah dalam dunia Islam. Pendekatan historiografi kontemporer kemudian mendorong pembacaan sejarah Islam yang lebih transnasional dan menempatkan pengalaman lokal sebagai bagian dari dinamika peradaban Islam global. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Adabiya*. Menunjukkan penulisan sejarah Islam modern cenderung dipengaruhi orientasi historiografi nasional sehingga dalam beberapa kasus mengurangi pembacaan sejarah Islam sebagai jaringan peradaban global. Oleh karena itu, historiografi Islam kontemporer didorong untuk menempatkan pengalaman lokal dalam konteks sejarah dunia Islam yang lebih luas.⁷ Begitupun dalam *Journal of Religious Studies*. menunjukkan bahwa perkembangan narasi Islam modern tidak berdiri dalam ruang nasional semata, tetapi terbentuk melalui interaksi dengan dinamika global dunia Islam sehingga pembacaan sejarah yang terlalu nasionalistik berpotensi menyederhanakan hubungan historis antarmasyarakat Muslim.⁸ Kajian lain dalam *jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. Menunjukkan bahwa kajian mengenai relasi Islam dan nasionalisme menunjukkan bahwa konstruksi sejarah dalam kerangka negara-bangsa modern sering mengarahkan narasi ke identitas nasional sehingga dimensi keterhubungan historis dunia Islam menjadi kurang mendapat perhatian.⁹

Dalam konteks pendidikan Islam, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk merekonstruksi pembelajaran sejarah Islam secara lebih kritis dan reflektif. Pendidikan tidak cukup hanya mentransmisikan fakta sejarah, tetapi juga harus membentuk kemampuan analitis peserta didik dalam memahami dinamika sosial-politik dunia Islam secara utuh. Dengan demikian, kajian mengenai dinamika dunia Islam pasca keruntuhan Kekhalifahan Utsmani menjadi penting sebagai upaya membangun kesadaran sejarah, memperkuat identitas intelektual umat, serta menghadirkan model pendidikan Islam yang responsif terhadap tantangan global kontemporer.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis merasa penting mengkaji masalah berikut. Apa penyebab utama keruntuhan Turki Usmani? Bagaimana peran Revolusi Arab dalam pembentukan dunia Islam modern? Bagaimana bentuk neo-kolonialisme Barat di dunia Islam? Bagaimana narasi dunia

⁷ Puji Miftahul Arfi, 'Corak Historiografi Islam Indonesia Periode Modern', *Journal Homepage*, 26.2 (2024), 202–11 <<https://doi.org/10.22373/adabiya.v26i2.21658>>.

⁸ Syaifudin Zuhri, 'The Islamic Public Sphere : Manifestations Of Islam In The Contemporary Indonesia', *Millah*, XI.2 (2016), 453–72 <<https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art6>>.

⁹ Universitas Alma Ata, 'Islam Dan Nasionalisme : Studi Atas Pergumulan Islam Dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia Hairiyah Penerimaan Islam Terhadap Konsep Nasionalisme Adalah Upaya Bagaimana Mempertahankan Konsep Politik Islam Dengan Gagasan Kebangsaan Dan Kewarg', 2.1 (2022).

Islam abad ke-20 dalam buku pelajaran? Bagaimana idealnya penyampaian materi ini dalam pendidikan?

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis faktor keruntuhan Usmani. Menganalisis peran Revolusi Arab dalam pembentukan dunia Islam modern. Mengkaji dampak geopolitik dan neo-kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Mengkritisi narasi pendidikan sejarah Islam. Merumuskan model pembelajaran sejarah Islam yang ideal berbasis pendekatan kritis, integratif, dan kontekstual.

Dengan demikian, tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi historiografi Islam serta kontribusi praktis bagi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang lebih reflektif dan berdaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkritisi fenomena historis serta dampak sosial-politik dan aspek pendidikan pasca keruntuhan Kekhalifahan Utsmani secara mendalam.¹⁰

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan historis-analitis dengan corak kritis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri peristiwa keruntuhan Kekhalifahan Utsmani, Revolusi Arab, dan dinamika neo-kolonialisme.¹¹ Sementara pendekatan analitis-kritis digunakan untuk mengkritisi narasi sejarah dalam buku pelajaran serta merumuskan rekomendasi pembelajaran yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.¹²

Sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen sejarah asli dan teks klasik, seperti *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi, serta dokumen penting seperti Perjanjian Sykes–Picot dan reformasi Atatürk.¹³ Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku dan literatur ilmiah terkait, di antaranya: *A History of Islamic Societies* karya Ira M. Lapidus, *A History of the Arab Peoples* karya Albert Hourani, *Turkey: A Modern History* karya Erik J. Zürcher, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism* karya Kwame Nkrumah, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* karya Azyumardi Azra, serta buku pelajaran Sejarah Islam dan Pendidikan Agama Islam yang beredar di Indonesia.¹⁴

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6–11.

¹¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 2008), 39–45.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

¹³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011); Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985).

¹⁴ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014); Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples* (London: Faber and Faber, 1991); Erik J. Zürcher, *Turkey: A Modern History* (London: I.B. Tauris, 2004); Kwame Nkrumah, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism* (London: Thomas Nelson & Sons, 1965); Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana, 2012).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dan kajian pustaka secara sistematis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut: inventarisasi literatur terkait topik, pembacaan intensif dan pencatatan (*note-taking*), klasifikasi data berdasarkan tema (keruntuhan Usmani, Revolusi Arab, neo-kolonialisme, narasi pendidikan), serta ekstraksi kutipan penting dan fakta historis.¹⁵

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten kualitatif dan analisis historis-kritis. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data (memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data), (2) penyajian data dalam bentuk narasi, tabel perbandingan, dan kronologi, (3) verifikasi dan penarikan kesimpulan secara induktif dengan selalu mengaitkan data historis dengan konteks pendidikan Islam kontemporer, dan (4) analisis kritis terhadap narasi yang ada untuk menemukan bias, kekurangan, dan peluang rekonstruksi.¹⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan penekanan pada evaluasi kritis terhadap narasi sejarah dan rekomendasi pembelajaran yang ideal.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Keruntuhan Turki Usmani

Hasil kajian menunjukkan bahwa keruntuhan Turki Usmani tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi krisis multidimensional yang mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal didominasi oleh kemunduran birokrasi, korupsi yang meluas, lemahnya kepemimpinan politik, serta ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, faktor eksternal berupa tekanan militer dari Eropa, kekalahan dalam Perang Dunia I, serta intervensi politik Barat mempercepat disintegrasi kekuasaan Utsmani hingga mencapai puncaknya pada penghapusan khilafah tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk melalui proyek sekularisasi negara.

Tabel 1 Faktor Keruntuhan Turki Usmani

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1	Kemunduran birokrasi	Tekanan militer negara Eropa
2	Korupsi yang meluas	Kekalahan dalam Perang Dunia I
3	Lemahnya kepemimpinan politik	Intervensi politik Barat
4	Ketertinggalan IPTEK	Sistem kolonialisme Barat

¹⁵ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

¹⁶ dan Johnny Saldaña Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd Ed* (California: Sage Publications, 2014).

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2016).

Tabel 1. Kelemahan internal memperbesar dampak tekanan eksternal.

Revolusi Arab dan Transformasi Dunia Islam Modern

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Revolusi Arab memiliki peran signifikan dalam transformasi struktur politik dunia Islam. Revolusi ini tidak hanya dipengaruhi oleh semangat nasionalisme Arab, tetapi juga intervensi Inggris dan Prancis melalui politik *divide et impera* serta Perjanjian Sykes-Picot. Akibatnya, dunia Islam mengalami pergeseran dari sistem kekhalifahan menuju negara-bangsa modern.

Gambar 2 Transformasi Dunia Islam Pasca Revolusi Arab



Dampak jangka panjang dari proses ini adalah munculnya fragmentasi politik dunia Islam yang hingga kini masih memengaruhi solidaritas umat Islam dalam skala global.

Bentuk Neo-Kolonialisme Barat di Dunia Islam

Neo-kolonialisme Barat dalam dunia Islam tidak lagi berbentuk penjajahan fisik, melainkan dominasi struktural yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk dominasi ini lebih halus namun memiliki dampak yang lebih kompleks dan berkelanjutan.

Tabel 3 Bentuk Neo-Kolonialisme Barat

Bidang	Bentuk Dominasi	Dampak
Politik	Intervensi kebijakan & dukungan rezim pro-Barat	Ketergantungan politik

Ekonomi	Penguasaan sumber daya & lembaga keuangan global	Ketimpangan ekonomi
Budaya	Westernisasi & sekularisasi	Krisis identitas keislaman
Pendidikan	Kurikulum berbasis nilai Barat	Marginalisasi perspektif Islam

Tabel 3.1 Neo-kolonialisme melemahkan kedaulatan negara-negara Muslim.

Analisis Narasi Dunia Islam dalam Buku Pelajaran

Hasil analisis terhadap buku pelajaran sejarah Islam menunjukkan bahwa narasi dunia Islam abad ke-20 memiliki sejumlah kelemahan. Narasi yang disajikan cenderung deskriptif, kurang analitis, serta belum mampu menggambarkan kompleksitas sejarah secara utuh. Selain itu, terdapat kecenderungan bias Eurocentrism yang mengakibatkan perspektif internal umat Islam kurang terwakili.

Gambar 4 Kelemahan Narasi Buku Teks Sejarah Islam



Gambar 4.1 Rendahnya kemampuan peserta didik memahami keterkaitan antara keruntuhan khilafah, kolonialisme, neo-kolonialisme, dan dinamika geopolitik dunia Islam modern.

Rekonstruksi Narasi Pendidikan Sejarah Islam

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan rekonstruksi narasi pendidikan sejarah Islam melalui pendekatan kritis-historis, integratif, dan kontekstual. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek kronologis, tetapi juga analisis sebab-akibat dan relevansi kontemporer.

Tabel 5 Model Rekonstruksi Narasi Sejarah Islam

Aspek	Pendekatan Lama	Pendekatan Baru
Orientasi	Deskriptif	Kritis-historis
Perspektif	Eurocentrism	Integratif-Islamik
Analisis	Kronologis	Kontekstual & sebab-akibat
Tujuan	Hafalan fakta	Literasi sejarah & kesadaran kritis

Tabel 5 Rekonstruksi diharapkan memperkuat identitas keislaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi.

PEMBAHASAN

Sebab-Sebab Keruntuhan Turki Usmani

Runtuhnya Kekhalifahan Utsmani pada awal abad ke-20 merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor internal, tekanan eksternal, serta transformasi ideologis pada fase akhir kekuasaannya. Keruntuhan tersebut tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai akumulasi krisis multidimensional yang mencakup aspek politik, ekonomi, militer, sosial, dan intelektual. Dalam historiografi modern, kemunduran Utsmani sering diposisikan sebagai konsekuensi dari kegagalan institusional dalam merespons perubahan global yang berlangsung sangat cepat sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20.¹⁸ Kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa keruntuhan Utsmani dipengaruhi oleh ketidakmampuan negara mempertahankan legitimasi politik dan melakukan modernisasi secara efektif di tengah meningkatnya tekanan internasional.

Faktor internal diantaranya, *pertama*, kemunduran sistem birokrasi pemerintahan. Pada masa kejayaannya, Utsmani memiliki struktur administrasi yang relatif efisien dan mampu mengelola wilayah yang sangat luas melalui sistem desentralisasi yang terkendali. Namun, memasuki abad ke-18 dan ke-19, birokrasi mulai mengalami stagnasi dan kehilangan kapasitas adaptifnya.¹⁹ Selain itu menguatnya sistem patronase menyebabkan jabatan-jabatan strategis tidak lagi didasarkan pada kompetensi dan profesionalitas, tetapi pada kedekatan politik dan loyalitas personal. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan serta melemahnya kontrol pusat terhadap wilayah perifer.

Kedua, Korupsi serta lemahnya kepemimpinan, praktik korupsi yang meluas juga mempercepat proses keruntuhan. Korupsi tidak hanya terjadi pada level administratif, tetapi juga menjangkau elit politik dan militer sehingga merusak legitimasi negara dan mengurangi efektivitas

¹⁸ Erik J. Zürcher, *Turkey: A Modern History* (London: I.B. Tauris, 2004).

¹⁹ Halil İnalcık, *The Ottoman Empire: The Classical Age* (London: Phoenix Press, 2000).

kebijakan publik.²⁰ Lemahnya kepemimpinan pada masa akhir Utsmani memperburuk situasi tersebut. Para sultan pada abad ke-19 dinilai tidak mampu melakukan reformasi struktural secara konsisten dalam menghadapi perubahan geopolitik global. Reformasi Tanzimat yang diharapkan menjadi solusi modernisasi justru menghadapi berbagai hambatan implementasi dan resistensi internal.²¹

Ketiga, keteringgalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak abad ke-17, perkembangan intelektual dan kelembagaan pendidikan di wilayah Utsmani menunjukkan perlambatan relatif dibanding percepatan perkembangan sains di Eropa. Dominasi sistem pendidikan tradisional, keterbatasan pengembangan ilmu empiris, dan lambatnya adaptasi terhadap perubahan teknologi menyebabkan kemampuan inovasi Utsmani melemah pada era ketika Eropa memasuki Revolusi Ilmiah dan kemudian Revolusi Industri. Namun demikian, beberapa kajian menegaskan bahwa kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai perlambatan transformasi daripada berhentinya aktivitas intelektual secara total.²²

Adapun faktor eksternal diantaranya, *pertama*, Intervensi Eropa, meningkatnya intervensi politik serta persaingan kekuatan Eropa memperlemah kemampuan negara mempertahankan kedaulatan dan stabilitas wilayahnya.²³ Intervensi dilakukan tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui diplomasi, perjanjian internasional, dan eksploitasi terhadap kelemahan internal kekhalifahan.

Kedua, Perang Dunia I, keterlibatan Utsmani dalam Perang Dunia I menjadi titik krusial yang mempercepat keruntuhannya. Bergabung dengan Blok Sentral menyebabkan Utsmani harus menghadapi kekuatan Sekutu yang lebih unggul secara ekonomi dan militer.²⁴ Kekalahan perang menyebabkan hilangnya sebagian besar wilayah strategis. Perjanjian Sèvres tahun 1920 menjadi simbol formal berakhirnya dominasi politik Utsmani di kawasan tersebut.

Ketiga, Intervensi politik Barat. Intervensi ini juga mempercepat proses disintegrasi internal Utsmani. Sejak abad ke-18, meningkatnya tekanan geopolitik dari negara-negara Eropa, khususnya Rusia, menyebabkan melemahnya posisi Utsmani dalam percaturan internasional dan mempercepat proses kemundurannya.²⁵ Dukungan terhadap Revolusi Arab memperlihatkan bagaimana strategi *divide et impera* digunakan untuk memecah solidaritas politik dalam kekhalifahan. Akibatnya, identitas politik berbasis kesatuan umat mulai tergeser oleh nasionalisme teritorial.

²⁰ Stanford J. Shaw dan Ezel Kural Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

²¹ Roderic H. Davison, "The Advent of the Principle of Representation in the Government of the Ottoman Empire," *Beginnings of Modernization in the Middle East* (1968), hlm. 93–108.

²² Muhammad Basri and others, '11-19+Dampak+Kemunduran+Kerajaan+Turki+Usmani+Terhadap+Pendidikan', *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAF)*, 2.1 (2023).

²³ Kekhalifahan Utsmani, 'T i p S', 2.2 (2024), 101–9.

²⁴ Eugene Rogan, *The Fall of the Ottomans* (New York: Basic Books, 2015).

²⁵ Nurbaya Nurbaya, Syamsudin Darussalam, and Umar Sulaiman, 'Peradaban Islam Dinasti Usmani Di Turki', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.12 (2025), 842–46.

Selain faktor internal dan eksternal Salah satu peristiwa penting setelah berakhirnya Kesultanan Utsmani adalah kebijakan sekularisasi yang dijalankan Mustafa Kemal Atatürk melalui penghapusan institusi khilafah secara resmi pada tahun 1924. Meskipun peristiwa tersebut bukan penyebab utama keruntuhan Utsmani, melainkan menandai berakhirnya kesinambungan institusi politik Islam yang selama berabad-abad dipandang sebagai simbol persatuan umat dan membuka fase baru berupa negara-bangsa modern di Turki.²⁶ Penghapusan tersebut tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menimbulkan perubahan ideologis yang besar terhadap struktur politik dunia Islam.

Setelah penghapusan khilafah, Atatürk melakukan reformasi sekuler yang mencakup penghapusan hukum Islam dalam sistem peradilan, perubahan alfabet Arab menjadi Latin, serta pembatasan institusi keagamaan dalam ruang publik.²⁷ Reformasi ini dipandang sebagai upaya modernisasi negara, namun juga memunculkan kritik karena dianggap memutus kesinambungan historis dan identitas Islam yang telah lama menjadi fondasi masyarakat Turki.²⁸

Dengan demikian, keruntuhan Kekhalifahan Utsmani merupakan hasil interaksi faktor internal berupa kemunduran birokrasi, korupsi, dan ketertinggalan ilmu pengetahuan dengan faktor eksternal berupa tekanan Eropa, kekalahan perang, dan intervensi politik global. Transformasi ideologis melalui sekularisasi Atatürk menjadi penanda berakhirnya sistem khilafah dan membuka fase baru sejarah dunia Islam yang ditandai oleh fragmentasi politik serta munculnya dominasi global Barat.

Revolusi Arab dan Lahirnya Negara-Negara Islam

Gerakan nasionalisme di wilayah Arab yang dikenal sebagai Revolusi Arab (*Arab Revolt*) turut andil dalam percepatan runtuhnya Kekhalifahan Utsmani. Peristiwa ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah dunia Islam karena menandai transisi dari sistem politik berbasis khilafah menuju sistem negara-bangsa (*nation-state*) yang terfragmentasi.²⁹ Revolusi Arab tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai gerakan pembebasan dari dominasi Utsmani, melainkan sebagai fenomena historis yang kompleks yang mempertemukan kepentingan elit Arab, strategi geopolitik Barat, serta perubahan struktur politik global pada awal abad ke-20.³⁰

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi Revolusi Arab adalah berkembangnya nasionalisme Arab pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nasionalisme ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya sentralisasi pemerintahan Utsmani dan semakin terbatasnya ruang politik bagi identitas Arab di wilayah kekhalifahan.³¹ Pada awalnya, nasionalisme Arab berkembang dalam bentuk gerakan intelektual dan kebudayaan yang tumbuh melalui lembaga

²⁶ Runtuhnya Khilafah, Turki Utsmani, and Miftahul Jannah, 'Tersebut , Sebab Tanpa Negara Mustahil Segala Aturan Bernegara Dan Bermasyarakat Diadopsinya Dari Para Imperialis , Yakni Sistem Republik , Yang Telah Diumumkan Kriminal Paling Akbar Pada Abad Ke-20 Lalu , Yang Tercatat Sebagai Episode Paling Tegaknya Isl', 1.1 (2019), 65–78.

²⁷ Andrew Mango, *Atatürk* (London: John Murray, 1999).

²⁸ Feroz Ahmad, 'Politics and Islam in Modern Turkey', *Middle Eastern Studies*, 27.1 (1991), 3–21.

²⁹ Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples* (Cambridge: Harvard University Press, 1991).

³⁰ Eugene Rogan, *The Arabs: A History* (New York: Basic Books, 2009), hlm. 157–171

³¹ Rashid Khalidi, *Resurrecting Empire* (Boston: Beacon Press, 2004), hlm. 64–79

pendidikan modern, media cetak, organisasi pemuda, dan jaringan intelektual di pusat-pusat kota seperti Damaskus, Beirut, dan Kairo.³² Seiring meningkatnya ketegangan politik, gerakan tersebut berkembang menjadi tuntutan politik yang menghendaki otonomi bahkan kemerdekaan dari pemerintahan Utsmani.

Selain faktor nasionalisme, konflik antara elit Arab dan pemerintah pusat Utsmani juga menjadi faktor yang mempercepat Revolusi Arab. Pada awal abad ke-20, pemerintahan Utsmani yang dipengaruhi gerakan Turki Muda (*Young Turks*) menerapkan kebijakan sentralisasi yang lebih kuat terhadap wilayah Arab.³³ Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kontrol administratif, penggunaan bahasa Turki dalam pemerintahan, pembatasan otonomi daerah, dan berkurangnya peran elit lokal dalam struktur kekuasaan. Kondisi tersebut memicu ketegangan politik yang semakin meningkat, terutama di wilayah Hijaz, Suriah, dan kawasan Levant. Konflik mencapai puncaknya ketika Hussein bin Ali, Syarif Makkah, memimpin pemberontakan terhadap Utsmani pada tahun 1916. Pemberontakan tersebut berkembang menjadi Revolusi Arab yang kemudian memperoleh dukungan internasional dan menjadi salah satu faktor penting dalam melemahkan posisi Utsmani pada Perang Dunia I.³⁴

Selain kedua hal diatas peran Inggris dan Prancis memiliki pengaruh besar terhadap jalannya Revolusi Arab. Salah satu bukti paling nyata adalah adanya Perjanjian Sykes–Picot tahun 1916, yaitu kesepakatan rahasia antara Inggris dan Prancis yang bertujuan membagi wilayah bekas kekuasaan Utsmani di Timur Tengah setelah perang berakhir.³⁵ Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa dukungan Barat terhadap gerakan Arab tidak sepenuhnya didasarkan pada semangat pembebasan, tetapi juga berorientasi pada kepentingan geopolitik dan penguasaan wilayah strategis.³⁶ Kawasan seperti Irak, Suriah, Palestina, dan Yordania menjadi objek pembagian pengaruh yang kemudian membentuk konfigurasi politik Timur Tengah modern.

Selain melalui perjanjian rahasia, Inggris juga memberikan dukungan langsung kepada gerakan Arab dalam bentuk bantuan militer, logistik, serta janji pembentukan negara Arab merdeka setelah perang selesai.³⁷ Tokoh seperti Thomas Edward Lawrence atau Lawrence of Arabia memainkan peran penting dalam membangun komunikasi politik dan koordinasi strategi militer antara Inggris dan pasukan Arab.³⁸ Melalui pendekatan tersebut, Inggris berhasil memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat Arab terhadap pemerintahan Utsmani untuk melemahkan posisi lawan dalam Perang Dunia I. Namun setelah perang berakhir, janji kemerdekaan tersebut tidak sepenuhnya diwujudkan. Sebaliknya, wilayah Arab justru ditempatkan dalam sistem mandat internasional yang berada di bawah pengawasan Inggris dan Prancis. Situasi ini kemudian

³² George Antonius, *The Arab Awakening* (London: Hamish Hamilton, 1938), hlm. 89–117

³³ Erik J. Zürcher, *Turkey: A Modern History* (London: I.B. Tauris, 2004), hlm. 98–115

³⁴ Eugene Rogan, *The Fall of the Ottomans* (New York: Basic Books, 2015), hlm. 271–298.

³⁵ James Barr, *A Line in the Sand* (London: Simon & Schuster, 2011), hlm. 23–39

³⁶ David Fromkin, *A Peace to End All Peace* (New York: Henry Holt, 1989), hlm. 261–280

³⁷ Elie Kedourie, *England and the Middle East* (London: Bowes & Bowes, 1956), hlm. 40–61

³⁸ Malcolm Brown, *Lawrence of Arabia* (London: Thames & Hudson, 2005), hlm. 84–103

melahirkan rasa kekecewaan yang menjadi salah satu akar konflik politik di Timur Tengah hingga masa kontemporer.³⁹

Adapun dampak Revolusi Arab diantaranya, *pertama*, terbentuknya negara-negara baru di wilayah Timur Tengah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kekhalifahan Utsmani, seperti Irak, Suriah, Yordania, dan Arab Saudi.⁴⁰ Pembentukan negara-negara tersebut sebagian besar tidak didasarkan pada kesatuan historis dan budaya masyarakat, tetapi lebih dipengaruhi oleh kompromi politik antara kekuatan kolonial dan elit lokal.⁴¹ Akibatnya, banyak batas negara yang terbentuk bersifat rekayasa dan menjadi sumber konflik politik berkepanjangan.

Kedua, dampak yang lebih luas adalah perubahan mendasar dalam struktur politik dunia Islam. Jika sebelumnya umat Islam berada dalam kerangka politik yang relatif terintegrasi melalui institusi khilafah, maka pasca revolusi dunia Islam berkembang menjadi kumpulan negara-negara nasional yang berdiri sendiri.⁴² Transformasi tersebut turut mengubah identitas politik umat Islam. Konsep *ummah* sebagai komunitas global mulai bergeser menjadi identitas nasional yang berlandaskan batas teritorial dan kepentingan negara.⁴³ Perubahan ini tidak hanya memengaruhi hubungan antarnegara Muslim, tetapi juga berdampak terhadap sistem pendidikan, perkembangan pemikiran politik Islam, dan konstruksi kesadaran sejarah umat.

Dengan demikian, Revolusi Arab merupakan peristiwa historis yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan dunia Islam modern. Di satu sisi, revolusi ini mencerminkan aspirasi masyarakat Arab untuk menentukan nasib politiknya sendiri, namun di sisi lain juga membuka ruang dominasi baru Barat melalui mekanisme kolonial dan neo-kolonialisme. Fragmentasi politik yang lahir dari proses tersebut hingga kini masih menjadi tantangan utama dalam membangun solidaritas dunia Islam pada tingkat global.

Neo-Kolonialisme Barat di Dunia Islam

Pasca runtuhnya Kekhalifahan Utsmani pada tahun 1924, dunia Islam tidak sepenuhnya terbebas dari dominasi kekuatan Barat. Berakhirnya kolonialisme formal justru diikuti oleh munculnya pola dominasi baru yang lebih kompleks dan sistematis, yaitu neo-kolonialisme. Konsep ini secara teoritis dipopulerkan oleh Kwame Nkrumah yang menjelaskan bahwa negara-negara yang secara formal telah memperoleh kemerdekaan tetap berada di bawah pengaruh dan kontrol negara-negara kuat melalui mekanisme politik, ekonomi, dan budaya.⁴⁴ Dalam konteks dunia Islam, neo-kolonialisme tidak lagi diwujudkan melalui pendudukan militer secara langsung, tetapi melalui pembentukan struktur ketergantungan yang memengaruhi arah kebijakan negara, pembangunan ekonomi, serta konstruksi identitas sosial masyarakat Muslim.⁴⁵

³⁹ Elizabeth Monroe, "Britain's Moment in the Middle East," *Middle Eastern Studies*, Vol. 1, No. 2 (1965), hlm. 89–106

⁴⁰ Kasdi Abdurrohman, 'Fundamentalisme Dan Radikalisme Dalam Pusaran Krisis Politik Di Timur Tengah', *Jurnal Penelitian*, 12.2 (2018), 381.

⁴¹ Rio Sundari, 'Studi Pemetaan Tipologi Konflik Di Kawasan Timur Tengah', *Jurnal Niara*, 14.3 (2022), 252–58.

⁴² Adeed Dawisha, *Arab Nationalism in the Twentieth Century* (Princeton: Princeton University Press, 2003), hlm. 124–146

⁴³ Fawaz A. Gerges, "The Transformation of the Arab World," *Journal of Democracy*, Vol. 22, No. 4 (2011), hlm. 34–48

⁴⁴ Kwame Nkrumah, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism* (London: Thomas Nelson & Sons, 1965), hlm. ix–xii

⁴⁵ Anouar Abdel-Malek, "Contemporary Arab Political Thought," *Social Problems*, Vol. 7, No. 4 (1960), hlm. 315–327

Berbeda dengan kolonialisme klasik yang bersifat teritorial, neo-kolonialisme bekerja melalui instrumen yang lebih halus dan tidak selalu tampak sebagai bentuk penjajahan. Namun justru karena sifatnya yang tidak langsung, pengaruh neo-kolonialisme cenderung lebih mendalam dan berjangka panjang dalam membentuk relasi kekuasaan global.

Adapun bentuk dari neo-kolonialisme *pertama*, intervensi politik. Pengendalian politik melalui intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintahan negara-negara Muslim. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa, sering kali terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam melalui diplomasi, bantuan keamanan, tekanan ekonomi, maupun dukungan terhadap kelompok politik tertentu.⁴⁶ Intervensi tersebut umumnya dibenarkan atas nama stabilitas regional, demokratisasi, atau perlindungan kepentingan internasional. Akan tetapi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepentingan strategis seperti pengamanan jalur energi, pengaruh geopolitik, dan kontrol kawasan tetap menjadi faktor dominan di balik kebijakan tersebut.⁴⁷

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kedaulatan politik banyak negara Muslim sering berada dalam posisi yang terbatas karena keputusan-keputusan strategis masih dipengaruhi oleh kekuatan eksternal.

Selain intervensi langsung, neo-kolonialisme juga beroperasi melalui dukungan terhadap rezim politik yang memiliki orientasi sejalan dengan kepentingan eksternal. Rezim semacam ini memperoleh legitimasi dan dukungan internasional yang kuat meskipun tidak selalu memiliki basis dukungan domestik yang kokoh.⁴⁸ Dalam jangka panjang, praktik ini melemahkan institusi demokrasi, menghambat pembangunan politik yang mandiri, serta memperbesar potensi konflik antara negara dan masyarakat sipil.⁴⁹

Kedua, eksploitasi ekonomi terutama melalui penguasaan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Banyak negara Muslim memiliki cadangan minyak, gas, dan mineral yang besar, namun distribusi manfaat ekonominya sering kali tidak seimbang.⁵⁰ Perusahaan-perusahaan asing memiliki pengaruh besar terhadap eksplorasi, produksi, dan distribusi sumber daya sehingga keuntungan ekonomi lebih banyak terakumulasi di pusat-pusat ekonomi global dibandingkan di negara penghasil.⁵¹ Situasi ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi internasional masih memperkuat ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara industri. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, kondisi tersebut dipahami sebagai bentuk reproduksi hubungan kolonial dalam sistem kapitalisme global, di mana negara-negara berkembang tetap berperan sebagai penyedia bahan mentah dan pasar konsumsi.⁵²

⁴⁶ Noam Chomsky, *Hegemony or Survival* (New York: Metropolitan Books, 2003), hlm. 41–63

⁴⁷ Fawaz A. Gerges, "The Middle East and the New World Order," *International Affairs*, Vol. 73, No. 3 (1997), hlm. 443–459

⁴⁸ Samir Amin, *Accumulation on a World Scale* (New York: Monthly Review Press, 1974), hlm. 96–114

⁴⁹ Lisa Anderson, "Absolutism and the Resilience of Monarchy in the Middle East," *Political Science Quarterly*, Vol. 106, No. 1 (1991), hlm. 1–15

⁵⁰ Kwame Nkrumah, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*, hlm. 239–251

⁵¹ Timothy Mitchell, *Carbon Democracy* (London: Verso, 2011), hlm. 115–132

⁵² Samir Amin, "Underdevelopment and Dependence in Black Africa," *Journal of Peace Research*, Vol. 9, No. 2 (1972), hlm. 105–119

Selain penguasaan sumber daya, neo-kolonialisme juga berlangsung melalui mekanisme utang luar negeri, sistem perdagangan internasional, serta pengaruh lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia.⁵³ Banyak negara Muslim menghadapi keterbatasan dalam menentukan kebijakan ekonomi nasional karena harus menyesuaikan diri dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga internasional. Akibatnya, ruang kedaulatan ekonomi menjadi semakin terbatas dan pembangunan domestik sering kali bergantung pada agenda global.⁵⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi tidak hanya berdampak pada distribusi kesejahteraan, tetapi juga memengaruhi kapasitas negara dalam membangun sistem ekonomi yang mandiri dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal.⁵⁵

Ketiga, westernisasi dan sekularisasi. Salah satu dimensi paling signifikan dari neo-kolonialisme adalah penetrasi nilai-nilai Barat melalui westernisasi dan sekularisasi. Proses ini ditandai oleh pemisahan agama dari negara yang menjadi prinsip utama dalam sistem politik modern Barat.⁵⁶ Di banyak negara Muslim, sekularisme diadopsi sebagai bagian dari agenda modernisasi dan pembangunan tanpa selalu mempertimbangkan konteks historis dan sosial masyarakat setempat. Akibatnya muncul ketegangan antara nilai-nilai Islam yang bersifat integral dengan struktur politik yang memisahkan agama dari ruang publik.⁵⁷

Selain dalam bidang politik, westernisasi juga memengaruhi perubahan budaya dan identitas masyarakat Muslim melalui pendidikan, media, teknologi informasi, dan arus globalisasi budaya.⁵⁸ Perubahan tersebut berdampak pada pergeseran pola hidup, orientasi sosial, serta konstruksi identitas generasi Muslim modern. Dalam sejumlah kasus, proses ini dipandang menyebabkan melemahnya identitas budaya lokal dan meningkatnya krisis identitas akibat tarik-menarik antara tradisi Islam dan modernitas global.⁵⁹

Dengan demikian, neo-kolonialisme Barat di dunia Islam menunjukkan bahwa bentuk dominasi modern tidak lagi bergantung pada kontrol teritorial, tetapi berlangsung melalui mekanisme struktural yang mencakup dimensi politik, ekonomi, dan budaya. Pengaruh tersebut tidak hanya membentuk sistem kekuasaan, tetapi juga memengaruhi cara berpikir, sistem nilai, serta identitas masyarakat Muslim secara luas. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap neo-kolonialisme menjadi penting, terutama dalam konteks pendidikan Islam, agar mampu membangun kesadaran historis, kemandirian intelektual, dan daya kritis umat dalam menghadapi tantangan global kontemporer.

⁵³ Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (New York: Norton, 2002), hlm. 39–58

⁵⁴ Walden Bello, "The Role of IMF and World Bank," *Third World Quarterly*, Vol. 27, No. 8 (2006), hlm. 1345–1357

⁵⁵ Ha-Joon Chang, *Kicking Away the Ladder* (London: Anthem Press, 2002), hlm. 29–44

⁵⁶ Talal Asad, *Formations of the Secular* (California: Stanford University Press, 2003), hlm. 181–203

⁵⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Islam and the Secular State," *Harvard International Review*, Vol. 30, No. 1 (2008), hlm. 74–79

⁵⁸ John Tomlinson, *Cultural Imperialism* (London: Continuum, 1991), hlm. 88–107

⁵⁹ Akbar S. Ahmed dan Hastings Donnan, "Islam, Globalization and Postmodernity," *The Muslim World*, Vol. 84, No. 3–4 (1994), hlm. 279–295

Narasi Dunia Islam dalam Buku Pelajaran

Kajian terhadap narasi dunia Islam dalam buku pelajaran, khususnya buku sejarah dan Pendidikan Agama Islam, menunjukkan adanya persoalan metodologis dan epistemologis yang cukup mendasar. Narasi yang disajikan dalam banyak buku pelajaran sering kali belum mampu merepresentasikan kompleksitas sejarah dunia Islam secara utuh, terutama dalam konteks pasca runtuhnya Kekhalifahan Utsmani dan transformasi politik dunia Islam modern. Sejarah cenderung diposisikan sebagai kumpulan fakta yang selesai dan tidak problematis, bukan sebagai proses historis yang penuh dengan negosiasi, konflik, perubahan struktur kekuasaan, dan interaksi global.⁶⁰

Alih-alih menghadirkan sejarah sebagai proses dinamis, buku pelajaran sering menyederhanakan realitas sejarah menjadi alur kronologis yang linier dan deskriptif. Akibatnya, peserta didik tidak memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika global yang memengaruhi perkembangan dunia Islam, termasuk kolonialisme, neo-kolonialisme, modernitas Barat, serta perubahan identitas politik umat Islam.⁶¹ Kajian pendidikan sejarah menunjukkan bahwa penyederhanaan narasi historis berpotensi mengurangi kemampuan peserta didik dalam membangun kesadaran historis dan kemampuan berpikir reflektif terhadap realitas sosial kontemporer.⁶²

Karakter dalam buku pelajaran

Karakter dalam buku pelajaran diantaranya, *pertama*, pendekatan yang bersifat deskriptif. Pada umumnya sejarah lebih banyak disampaikan dalam bentuk urutan peristiwa tanpa penjelasan yang memadai mengenai relasi sebab-akibat, konteks sosial-politik, maupun dampak jangka panjang dari suatu peristiwa.⁶³ Pendekatan ini memang memudahkan proses penyampaian materi, tetapi sekaligus mengurangi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan interpretatif terhadap sejarah. Dalam praktiknya, pembelajaran sejarah berubah menjadi aktivitas menghafal informasi daripada membangun pemahaman terhadap dinamika perubahan masyarakat.⁶⁴

Kedua, minim analisis kritis. Peristiwa penting seperti keruntuhan kekhalifahan, kolonialisme, dan pembentukan negara-negara modern sering kali disajikan secara normatif dan tidak membuka ruang terhadap perbedaan interpretasi sejarah.⁶⁵ Padahal, dalam historiografi modern, sejarah dipahami sebagai konstruksi pengetahuan yang selalu terbuka terhadap pembacaan ulang berdasarkan sudut pandang, konteks sosial, dan perkembangan metodologi penelitian.⁶⁶ Ketidadaan pendekatan kritis menyebabkan peserta didik kurang terbiasa

⁶⁰ James H. McMillan, *Educational Research* (Boston: Pearson, 2012), hlm. 341–352

⁶¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 143–158

⁶² Peter Seixas, "Historical Consciousness and Historical Thinking," *Public History Weekly*, Vol. 3, No. 27 (2015), hlm. 1–7

⁶³ Keith Barton dan Linda Levstik, *Teaching History for the Common Good* (New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2004), hlm. 37–49

⁶⁴ Sam Wineburg, "Historical Thinking and Other Unnatural Acts," *Phi Delta Kappan*, Vol. 80, No. 7 (1999), hlm. 488–499

⁶⁵ Jörn Rüsen, *History: Narration, Interpretation, Orientation* (New York: Berghahn Books, 2005), hlm. 63–74

⁶⁶ Hayden White, "The Historical Text as Literary Artifact," *Clio*, Vol. 3, No. 3 (1974), hlm. 277–303

mempertanyakan sumber, membandingkan perspektif, dan membangun argumentasi historis secara mandiri.

Ketiga, Narasi sejarah dalam buku pelajaran juga sering kali tidak menampilkan keterkaitan antara sejarah dunia Islam dan dinamika global secara menyeluruh. Peristiwa seperti kolonialisme Barat, Perang Dunia I, pembentukan negara-negara Timur Tengah, serta perkembangan sistem internasional sering dipisahkan dari konteks sejarah Islam.⁶⁷ Akibatnya, peserta didik mengalami keterbatasan dalam memahami bagaimana perubahan global memengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Muslim. Sejarah dunia Islam tampil sebagai sejarah regional yang terisolasi, bukan sebagai bagian dari sejarah dunia yang saling terhubung.⁶⁸

Problematika Narasi

Salah satu persoalan utama dalam narasi buku pelajaran adalah adanya kecenderungan *Eurocentrism*, yaitu perspektif yang menempatkan Barat sebagai pusat perkembangan peradaban dan ukuran utama kemajuan sejarah.⁶⁹ Perspektif ini dikritik oleh Samir Amin yang menyatakan bahwa dominasi epistemologi Barat dalam historiografi global menyebabkan pengalaman sejarah masyarakat non-Barat, termasuk dunia Islam, menjadi terpinggirkan.⁷⁰ Dalam konteks pendidikan, bias tersebut tampak pada penekanan berlebihan terhadap kontribusi Barat dalam modernitas, sementara kontribusi intelektual dan peradaban Islam kurang mendapat ruang yang proporsional.⁷¹

Selain bias Barat, narasi buku pelajaran juga cenderung kurang menghadirkan pengalaman historis umat Islam sebagai subjek sejarah. Sejarah Islam sering diceritakan dari sudut pandang eksternal yang menempatkan umat Islam sebagai objek perubahan, bukan pelaku utama sejarah.⁷² Padahal, pendekatan historiografi kontemporer menekankan pentingnya menghadirkan berbagai perspektif agar peserta didik dapat memahami bagaimana identitas, nilai, dan pengalaman sosial membentuk dinamika sejarah suatu masyarakat.⁷³

Problematika lain adalah kegagalan narasi sejarah dalam membangun kesadaran kritis (*critical historical consciousness*). Sejarah sering diperlakukan sebagai kumpulan informasi final yang tidak dapat diperdebatkan, sehingga peserta didik tidak terdorong untuk berpikir reflektif dan analitis.⁷⁴ Dalam pendidikan modern, pembelajaran sejarah seharusnya diarahkan untuk mengembangkan kesadaran historis yang memungkinkan peserta didik memahami keterkaitan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan serta mengembangkan kemampuan mengambil keputusan secara kritis.⁷⁵

⁶⁷ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. 471–489

⁶⁸ Salim Tamari, "Narrating Modern Islamic History and Identity Formation," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 21, No. 2 (2010), hlm. 187–205

⁶⁹ Samir Amin, *Eurocentrism* (New York: Monthly Review Press, 1989), hlm. 12–25

⁷⁰ Samir Amin, "Eurocentrism and the Challenge of Multipolarity," *Monthly Review*, Vol. 61, No. 1 (2009), hlm. 1–14

⁷¹ Edward Said, *Orientalism* (New York: Vintage Books, 1978), hlm. 54–67

⁷² James Gelvin, "Nationalism and Historical Memory in the Middle East," *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 33, No. 3 (2001), hlm. 353–372

⁷³ Peter Lee, "Understanding History," *Teaching History*, Vol. 72 (1993), hlm. 5–14

⁷⁴ Jörn Rüsen, "Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function and Ontogenetic Development," *Theorizing Historical Consciousness* (2004), hlm. 63–85

⁷⁵ Stéphane Lévesque, "Thinking Historically," *Canadian Social Studies*, Vol. 40, No. 1 (2006), hlm. 1–9

Dampak terhadap Peserta Didik

Salah satu dampak dari narasi sejarah yang kurang kritis adalah lemahnya identitas sejarah peserta didik. Pemahaman sejarah dunia Islam yang disajikan secara utuh dan reflektif memiliki peran penting dalam pembentukan identitas intelektual peserta didik. Ketika sejarah hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang terfragmentasi, peserta didik berpotensi mengalami kesulitan dalam memahami posisi dirinya sebagai bagian dari tradisi keilmuan dan peradaban Islam yang berkembang secara historis. Sebaliknya, pembelajaran yang menekankan kesinambungan tradisi intelektual Islam dapat memperkuat kesadaran historis, identitas pendidikan, dan orientasi keilmuan peserta didik.⁷⁶ Akibatnya, identitas keislaman yang terbentuk cenderung bersifat simbolik dan tidak memiliki akar historis yang kuat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi cara pandang peserta didik terhadap perkembangan global dan tantangan sosial yang dihadapi umat Islam.⁷⁷

Selain itu, narasi yang parsial juga menyebabkan peserta didik kurang memahami realitas geopolitik dunia Islam. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai kolonialisme, neo-kolonialisme, dan perubahan politik global, peserta didik sulit membaca persoalan dunia Islam secara kritis dan kontekstual.⁷⁸

Dengan demikian, narasi dunia Islam dalam buku pelajaran menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan sejarah dengan praktik pembelajaran yang berlangsung di lapangan. Dominasi pendekatan deskriptif, minimnya analisis kritis, dan bias epistemologis menyebabkan sejarah kehilangan fungsinya sebagai sarana pembentukan kesadaran dan pembebasan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi narasi pendidikan sejarah Islam yang lebih kritis, integratif, dan kontekstual agar pendidikan sejarah tidak hanya menjadi media transfer pengetahuan, tetapi juga sarana pembentukan identitas dan kesadaran historis umat di tengah tantangan global kontemporer.

Analisis dan Rekomendasi Pembelajaran

Transformasi dunia Islam pasca runtuhnya Kekhalifahan Utsmani serta munculnya fenomena fragmentasi politik dan neo-kolonialisme menuntut adanya rekonstruksi serius terhadap pendekatan pembelajaran sejarah Islam. Pendidikan tidak lagi cukup diposisikan sebagai proses transfer informasi yang bersifat deskriptif, tetapi harus diarahkan menjadi sarana pembentukan kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang memungkinkan peserta didik memahami realitas sosial dan geopolitik secara reflektif serta analitis.⁷⁹ Dalam konteks ini, pembelajaran sejarah Islam perlu dirancang secara sistematis melalui integrasi dimensi historis, sosial, politik, dan keagamaan

⁷⁶ Sri Rahayu Putri and Nurzena Nurzena, 'Kontribusi Peradaban Islam Terhadap Pendidikan Dan Tradisi Keilmuan Dunia : A Systematic Literature Review', 11.1 (2026), 82–90.

⁷⁷ Azyumardi Azra, 'Islamic Education and Reintegration of Science: Improving Islamic Higher Education', *Media Syari'ah*, 15.2 (2013), 257–64 <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1780>>.

⁷⁸ James Banks, "Diversity and Citizenship Education," *Educational Researcher*, Vol. 37, No. 3 (2008), hlm. 129–139

⁷⁹ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 1970), hlm. 71–86

sehingga pendidikan Islam mampu berfungsi sebagai instrumen transformasi intelektual dan penguatan identitas umat.⁸⁰

Pendekatan Ideal

Ada tiga jenis pendekatan yang penulis rekomendasikan dalam upaya rekonstruksi dalam pembelajaran sejarah. *Pertama*, Pendekatan kritis-historis, pendekatan ini memandang sejarah bukan sebagai kumpulan fakta yang selesai, tetapi sebagai konstruksi naratif yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi secara kritis.⁸¹ Peserta didik didorong untuk memahami hubungan sebab-akibat, mengidentifikasi bias historiografis, serta membandingkan berbagai perspektif dalam memahami suatu peristiwa. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *historical thinking* yang dikembangkan oleh Sam Wineburg yang menekankan pentingnya kemampuan interpretasi, analisis sumber, dan evaluasi argumentasi sejarah.⁸² Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak berhenti pada pertanyaan “apa yang terjadi”, tetapi berkembang menuju pertanyaan “mengapa peristiwa itu terjadi” dan “bagaimana dampaknya terhadap kondisi dunia Islam kontemporer”.⁸³

Kedua, pendekatan integrative. Pendekatan integratif bertujuan menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sosial-politik dalam pembelajaran sejarah Islam. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan integrasi ilmu yang dikembangkan oleh Azyumardi Azra yang menekankan pentingnya keterhubungan antara ilmu keislaman dan ilmu modern dalam pendidikan Islam.⁸⁴ Melalui pendekatan integratif, sejarah Islam dipahami sebagai bagian dari dinamika global yang saling terhubung, bukan sebagai fenomena yang berdiri sendiri.⁸⁵

Ketiga, pendekatan kontekstual, Sejarah tidak lagi dipahami sebagai narasi masa lalu yang jauh dan abstrak, tetapi sebagai sumber refleksi untuk memahami kondisi masa kini.⁸⁶ Dalam konteks dunia Islam, pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami hubungan antara kolonialisme, neo-kolonialisme, serta perkembangan geopolitik modern dengan realitas sosial yang mereka hadapi saat ini. Pendekatan kontekstual juga memperkuat *historical consciousness* sehingga sejarah menjadi sarana pembentukan kemampuan reflektif dan pengambilan keputusan yang lebih matang.⁸⁷

Model Pembelajaran

Berikut adalah model pembelajaran yang penulis rekomendasikan. *Pertama*, Model *Problem Based Learning* (PBL), melalui PBL, peserta didik dihadapkan pada persoalan nyata seperti konflik geopolitik, ketimpangan ekonomi, dan tantangan identitas dunia Islam kontemporer.⁸⁸ Proses pemecahan masalah dalam PBL tidak hanya menghasilkan penguasaan materi, tetapi juga

⁸⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 143–158

⁸¹ Jörn Rüsen, “Historical Consciousness,” *History and Theory*, Vol. 28, No. 3 (1989), hlm. 34–60

⁸² Sam Wineburg, “Historical Thinking and Other Unnatural Acts,” *Phi Delta Kappan*, Vol. 80, No. 7 (1999), hlm. 488–499

⁸³ Peter Seixas, “Historical Consciousness and Historical Thinking,” *Public History Weekly*, Vol. 3 (2015), hlm. 1–7

⁸⁴ Azyumardi Azra, “Islamic Education and Reintegration of Sciences,” *Media Syari’ah*, Vol. 15, No. 2 (2013), hlm. 263–276

⁸⁵ Fazlur Rahman, “Islamic Modernism,” *Journal of Near Eastern Studies*, Vol. 21, No. 4 (1962), hlm. 231–239

⁸⁶ John Dewey, *Experience and Education* (New York: Macmillan, 1938), hlm. 22–35

⁸⁷ Stéphane Lévesque, “Thinking Historically,” *Canadian Social Studies*, Vol. 40, No. 1 (2006), hlm. 1–9

⁸⁸ Howard Barrows, “A Taxonomy of Problem-Based Learning Methods,” *Medical Education*, Vol. 20, No. 6 (1986), hlm. 481–486

meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan menyusun argumentasi berbasis data.⁸⁹

Kedua, critical thinking, dalam pembelajaran sejarah Islam, pendekatan ini mendorong peserta didik untuk mempertanyakan asumsi, menilai kredibilitas sumber, dan menyusun interpretasi yang argumentatif.⁹⁰ Pendekatan ini sejalan dengan konsep pendidikan kritis Paulo Freire yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembebasan intelektual dan pengembangan kesadaran sosial.⁹¹ Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi penerima pengetahuan, tetapi juga aktor aktif dalam produksi pengetahuan.

Ketiga, diskusi, melalui diskusi peserta didik dapat memahami relasi internasional, dinamika kawasan Timur Tengah, serta posisi dunia Islam dalam sistem global.⁹² Diskusi semacam ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas dan menghindari cara pandang historis yang sempit dan deterministik. Pemahaman yang komprehensif terhadap sejarah peradaban Islam berperan dalam membantu peserta didik mengenali kontribusi intelektual umat Islam serta menempatkan dirinya sebagai bagian dari tradisi keilmuan yang berkelanjutan.⁹³

Rekomendasi Praktis

Adapun rekomendasi praktis diantaranya, *pertama*, integrasi sejarah Islam global dalam kurikulum pembelajaran. Selama ini, sejarah Islam sering dipersempit menjadi sejarah lokal atau nasional sehingga kurang menunjukkan keterhubungan antar wilayah dalam dunia Islam.⁹⁴ Dengan pendekatan sejarah global, peserta didik dapat memahami bahwa dunia Islam berkembang melalui jaringan intelektual, ekonomi, dan politik yang luas serta memiliki hubungan historis yang kuat dengan perkembangan dunia modern.⁹⁵

Kedua, Integrasi Isu Kontemporer, seperti konflik Timur Tengah, globalisasi, perubahan identitas, dan neo-kolonialisme. Integrasi tersebut memungkinkan peserta didik memahami relevansi sejarah terhadap kondisi aktual dan membangun kemampuan membaca perubahan sosial secara kritis.⁹⁶

Ketiga, Penggunaan sumber primer dalam pembelajaran sejarah Islam. Salah satu kelemahan pembelajaran sejarah Islam selama ini adalah dominasi sumber sekunder yang telah mengalami proses interpretasi berlapis. Oleh karena itu, penggunaan sumber primer menjadi penting untuk menghadirkan pengalaman historis yang lebih autentik.⁹⁷ Pendekatan ini sejalan dengan konsep

⁸⁹ John Savery, "Overview of Problem-Based Learning," *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, Vol. 1, No. 1 (2006), hlm. 9–20

⁹⁰ Robert Ennis, "Critical Thinking Assessment," *Theory into Practice*, Vol. 32, No. 3 (1993), hlm. 179–186

⁹¹ Paulo Freire, *Education for Critical Consciousness* (London: Continuum, 1974), hlm. 15–32

⁹² James Banks, "Diversity and Citizenship Education," *Educational Researcher*, Vol. 37, No. 3 (2008), hlm. 129–139

⁹³ Putri and Nurzena.

⁹⁴ Peter Stearns, *World History in Brief* (New York: Pearson, 2007), hlm. 41–55

⁹⁵ Marshall Hodgson, *The Venture of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1974), hlm. 92–109

⁹⁶ Henry Giroux, "Critical Pedagogy," *Harvard Educational Review*, Vol. 54, No. 4 (1984), hlm. 458–466

⁹⁷ Keith Barton, "Primary Sources in History Learning," *Theory and Research in Social Education*, Vol. 33, No. 4 (2005), hlm. 545–570

historical inquiry yang menempatkan peserta didik sebagai peneliti yang melakukan eksplorasi, pengujian sumber, serta membangun interpretasi berdasarkan bukti historis.⁹⁸ Penggunaan sumber primer juga memperkuat kemampuan peserta didik dalam mengenali perbedaan perspektif dan konflik interpretasi dalam sejarah Islam.

Keempat, penguatan literasi sejarah (*historical literacy*) menjadi elemen penting dalam rekonstruksi pembelajaran sejarah Islam. Literasi sejarah tidak hanya mencakup kemampuan memahami teks sejarah, tetapi juga kemampuan menganalisis konteks, mengenali bias, dan menghubungkan masa lalu dengan realitas masa kini.⁹⁹ Penguatan literasi sejarah menjadi sangat penting dalam menghadapi kompleksitas dunia Islam kontemporer. Peserta didik yang memiliki literasi sejarah yang baik akan lebih mampu membangun identitas historis yang kuat serta memahami posisinya dalam perkembangan global.¹⁰⁰

Dengan demikian, rekonstruksi pembelajaran sejarah Islam harus diarahkan pada pembentukan kesadaran kritis, identitas yang kuat, dan kemampuan analitis peserta didik. Pendekatan kritis-historis, integratif, dan kontekstual yang didukung penggunaan sumber primer dan penguatan literasi sejarah dapat menjadikan pendidikan Islam sebagai kekuatan transformasi yang membentuk generasi yang memiliki kesadaran historis yang mendalam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keruntuhan Turki Usmani merupakan hasil akumulasi krisis multidimensional yang melibatkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemunduran birokrasi, praktik korupsi yang meluas, lemahnya kepemimpinan politik, serta ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, faktor eksternal berupa tekanan militer dan politik dari negara-negara Eropa, kekalahan dalam Perang Dunia I, serta intervensi politik Barat semakin mempercepat disintegrasi kekuasaan Utsmani. Puncak keruntuhan tersebut ditandai dengan penghapusan institusi khilafah oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924 melalui proyek sekularisasi negara, yang sekaligus menandai berakhirnya simbol persatuan politik umat Islam secara formal.

Peran Revolusi Arab dalam pembentukan dunia Islam modern sangat signifikan karena revolusi ini menjadi titik awal transformasi struktur politik dunia Islam dari sistem kekhilafahan menuju sistem negara-bangsa modern. Revolusi Arab tidak hanya lahir dari semangat nasionalisme Arab dan konflik dengan pemerintah pusat Utsmani, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh intervensi Inggris dan Prancis melalui strategi politik *divide et impera*, termasuk melalui Perjanjian

⁹⁸ Bruce VanSledright, *In Search of America's Past* (New York: Teachers College Press, 2002), hlm. 88–102

⁹⁹ Peter Lee, "Historical Literacy and Historical Learning," *International Journal of Historical Learning*, Vol. 1, No. 1 (2001), hlm. 29–38

¹⁰⁰ Jerome Bruner, *Acts of Meaning* (Cambridge: Harvard University Press, 1990), hlm. 92–104

Sykes-Picot. Dampaknya adalah lahirnya negara-negara baru di kawasan Timur Tengah dengan batas-batas politik yang sebagian besar ditentukan oleh kepentingan kolonial Barat. Kondisi ini melahirkan fragmentasi politik dunia Islam yang hingga kini masih memengaruhi hubungan antarnegara Muslim serta melemahkan solidaritas umat dalam konteks global.

Neo-kolonialisme Barat di dunia Islam hadir dalam bentuk dominasi struktural yang mencakup bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dalam bidang politik, neo-kolonialisme tampak melalui intervensi kekuatan Barat dalam kebijakan pemerintahan negara-negara Muslim serta dukungan terhadap rezim yang sejalan dengan kepentingan geopolitik mereka. Dalam bidang ekonomi, dominasi terlihat melalui penguasaan sumber daya alam, ketergantungan pada lembaga keuangan internasional, dan sistem perdagangan global yang tidak seimbang. Sementara itu, dalam bidang budaya, westernisasi dan sekularisasi mendorong perubahan identitas masyarakat Muslim melalui pemisahan agama dari ruang publik dan penetrasi nilai-nilai Barat dalam sistem pendidikan serta gaya hidup. Dengan demikian, neo-kolonialisme menjadi bentuk penjajahan modern yang lebih halus tetapi memiliki dampak yang mendalam terhadap kedaulatan dunia Islam.

Adapun narasi dunia Islam abad ke-20 dalam buku pelajaran pada umumnya masih menunjukkan berbagai kelemahan mendasar. Narasi yang disajikan cenderung bersifat deskriptif, minim analisis kritis, dan belum mampu menampilkan kompleksitas sejarah dunia Islam secara utuh. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bias Barat (Eurocentrism) yang menyebabkan perspektif internal umat Islam kurang terakomodasi. Akibatnya, peserta didik belum memperoleh pemahaman historis yang komprehensif mengenai hubungan antara keruntuhan khilafah, kolonialisme, neo-kolonialisme, dan dinamika geopolitik Islam kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi narasi pendidikan sejarah Islam melalui pendekatan kritis-historis, integratif, dan kontekstual agar pembelajaran mampu membangun kesadaran sejarah, identitas keislaman yang kuat, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menghadapi tantangan global.

Saran

Perlu dilakukan pembaruan kurikulum sejarah Islam secara lebih komprehensif dan adaptif. Kurikulum sejarah Islam tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek kronologis dan narasi kejayaan masa lalu, tetapi juga harus memuat pembahasan kritis mengenai keruntuhan peradaban Islam, kolonialisme, neo-kolonialisme, serta transformasi politik dunia Islam modern. Pembaruan ini penting agar peserta didik memperoleh pemahaman sejarah yang utuh dan mampu melihat perjalanan peradaban Islam secara objektif, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam konteks global.

Penguatan perspektif kritis dalam pembelajaran sejarah Islam perlu menjadi perhatian utama dalam proses pendidikan. Guru dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menganalisis sumber sejarah, mengidentifikasi

berbagai sudut pandang, serta mengevaluasi narasi-narasi yang berkembang dalam buku pelajaran maupun media lainnya. Melalui pendekatan ini, pembelajaran sejarah tidak lagi sekadar transfer informasi, melainkan menjadi sarana pembentukan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan analitis yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas persoalan dunia Islam kontemporer.

Integrasi sejarah Islam dengan realitas kontemporer harus dilakukan secara sistematis agar pembelajaran memiliki relevansi praktis bagi peserta didik. Peristiwa-peristiwa sejarah seperti keruntuhan Turki Usmani, Revolusi Arab, dan neo-kolonialisme perlu dikaitkan dengan kondisi geopolitik dunia Islam saat ini, termasuk konflik kawasan, tantangan globalisasi, krisis identitas, serta dinamika hubungan internasional negara-negara Muslim. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami bahwa sejarah bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan sumber pembelajaran strategis untuk membaca realitas masa kini dan merumuskan masa depan dunia Islam yang lebih mandiri, kritis, dan berkeadaban.

DAFTAR REFERENSI

- Abdel-Malek, Anouar, and Michael Pallis, *Contemporary Arab Political Thought* (Zed Books and U.S. distributor, Biblio Distribution Center, 1983) <<https://cir.nii.ac.jp/crid/1970867909890790312.bib?lang=en>> [accessed 26 June 2026]
- Ahmad, Feroz, 'Politics and Islam in Modern Turkey', *Middle Eastern Studies*, 27 (1991), 3–21
- Andrew Mango, *Atatürk* (London: John Muray, 1999)
- Arfi, Puji Miftahul, 'Corak Historiografi Islam Indonesia Periode Modern', *Journal Homepage*, 26 (2024), 202–11 <<https://doi.org/10.22373/adabiya.v26i2.21658>>
- Ata, Universitas Alma, 'Islam Dan Nasionalisme : Studi Atas Pergumulan Islam Dan Nasionalisme Masa Pergerakan Nasional Indonesia Hairiyah Penerimaan Islam Terhadap Konsep Nasionalisme Adalah Upaya Bagaimana Mempertahankan Konsep Politik Islam Dengan Gagasan Kebangsaan Dan Kewarg', 2 (2022)
- Azra, Azyumardi, 'Islamic Education and Reintegration of Science: Improving Islamic Higher Education', *Media Syari'ah*, 15 (2013), 257–64 <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1780>>
- Basri, Muhammad, Hesty, Pebrina Sagala, Br Nasution, and Amalia Mahfudza, '11-19+Dampak+Kemunduran+Kerajaan+Turki+Usmani+Terhadap+Pendidikan', *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat (JURRAFI)*, 2 (2023)
- Campbell, John C., and Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples, Foreign Affairs* (Cambridge: Harvard University Press, 1991), LXX <<https://doi.org/10.2307/20044894>>

- Halil İnalcık, *The Ottoman Empire: The Classical Age* (London: Phoenix Press, 2000)
- Hourani, Albert, *A History of the Arab Peoples* (Cambridge: Harvard University Press, 1991)
- Kasdi Abdurrohman, 'Fundamentalisme Dan Radikalisme Dalam Pusaran Krisis Politik Di Timur Tengah', *Jurnal Penelitian*, 12 (2018), 381
- Khaldun, Ibn, *The Muqaddimah: An Introduction to History* (Princeton: Princeton University Press, 1967)
- Khilafah, Runtuhnya, Turki Utsmani, and Miftahul Jannah, 'Tersebut , Sebab Tanpa Negara Mustahil Segala Aturan Bernegara Dan Bermasyarakat Diadopsinya Dari Para Imperialis , Yakni Sistem Republik , Yang Telah Diumumkan Kriminal Paling Akbar Pada Abad Ke-20 Lalu , Yang Tercatat Sebagai Episode Paling Tegaknya Isl', 1 (2019), 65–78
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd Ed* (California: Sage Publications, 2014)
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2016)
- Nkrumah, Kwame, *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism* (London: Thomas Nelson & Sons, 1965)
- Nurbaya, Nurbaya, Syamsudin Darussalam, and Umar Sulaiman, 'Peradaban Islam Dinasti Usmani Di Turki', *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2 (2025), 842–46
- Putri, Sri Rahayu, and Nurzena Nurzena, 'Kontribusi Peradaban Islam Terhadap Pendidikan Dan Tradisi Keilmuan Dunia : A Systematic Literature Review', 11 (2026), 82–90
- Rogan, Eugene, *The Fall of the Ottomans* (New York: Basic Books, 2015)
- Samsuriadi, Samsuriadi, Indo Santalia, and Wahyuddin Wahyuddin, 'Sejarah Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki Dan Ide Perbaharuan Mustafa Kemal', *JBKPI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam*, 2 (2023), 21–31 <<https://doi.org/10.26618/jbkpi.v2i02.8399>>
- Shaw, Stanford J. Shaw dan Ezel Kural, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020)
- Sundari, Rio, 'Studi Pemetaan Tipologi Konflik Di Kawasan Timur Tengah', *Jurnal Niara*, 14 (2022), 252–58
- Toynbee, Arnold J., *A Study of History* (London: Oxford University Press, 1957)
- Utsmani, Kekhalifahan, 'T i p S', 2 (2024), 101–9

Zuhri, Syaifudin, 'The Islamic Public Sphere : Manifestations Of Islam In The Contemporary Indonesia', *Millah*, XI (2016), 453–72 <<https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art6>>

Zürcher, Erik J., *Turkey: A Modern History* (London: I.B. Tauris, 2004)

Akarlı, E. D. (1998). Arab Nationalism and the Ottomans: Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918 . Hasan Kayali. *Journal of Palestine Studies*, 27(4), 107–108. <https://doi.org/10.1525/jps.1998.27.4.00p0010n>